

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAMUJU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dians Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026 dapat terlaksana. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Materi Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan disektor pangan. Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan terwujud apabila sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) berjalan dengan baik, sehingga sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya.

Pada akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kerja ini semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian paa Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi	41
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Program & Kegiatan	42
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional & Provinsi	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	57
3.3 Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	72
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kaidah Pelaksanaan	78
5.2 Rencana Tindak Lanjut	79

DAFTAR TABEL

Tabel	TC 29	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2025	15
Tabel	TC 30	Matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
Tabel	TC 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	41
Tabel	TC 32	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	55
Tabel	TC 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di singkat Renja Perangkat Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar didalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dalam Pelaksanaannya program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan dengan Tema pembangunan pada tahun 2026 yaitu **"Memperkuat pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan"**. Melalui arah kebijakan tersebut, prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

1. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan kelestarian lingkungan hidup.
- 3. Penguatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan serta investasi berbasis potensi daerah.**
4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan mendukung pengurangan kemiskinan.
5. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan .

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman ;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 10) Perpres No.22 Tahun 2009 dan Permentan No.43 Tahun 2009 Tentang

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 02);
- 19) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sesuai dengan sasaran dan tujuan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun 2026 dan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

I.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan RKPD tahun lalu dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan provinsi, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini meliputi tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Mamuju.

BAB V. PENUTUP

Bab Penutup terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju selama tahun 2024.

Urusan Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada Tahun 2024 melaksanakan 1 (satu) program rutin dan 4 (empat) program teknis. Realisasi anggaran mencapai 95 %.

Alokasi anggaran pokok pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju tahun 2024 sebesar Rp. 3.276.882.231,- meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.225.899.159,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.035.072.000,- dan setelah perubahan jumlah anggaran Dinas Ketahanan pangan sebesar Rp. 3.272.861.374,- dengan belanja tidak langsung Rp. 2.340.848.302,- dan belanja langsung sebesar Rp. . 932.013.072,-. Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.230.876.047,- atau sekitar 95 % dengan capaian kinerja sebesar 97 %.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD yaitu :

1. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan tahun 2024
 - a. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Realisasi 99 %)
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Realisasi 92 %)
Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya (realisasi 0 %).
2. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan tahun 2024:

- a. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Realisasi 100%).

Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Realisasi 100 %).

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Realisasi 100%).
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Realisasi 100%).
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan (Realisasi 100%).

Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Realisasi 100%).
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).

Kegiatan 3 : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Realisasi 100%).
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Realisasi 100%).

b. Program : Penanganan Kerawanan Pangan (Realisasi 100%).

Kegiatan 1 : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Realisasi 100%).

Kegiatan 2 : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).

c. Program : Pengawasan Keamanan Pangan (Realisasi 100%).

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Realisasi 100%).

d. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Realisasi 96 %)

Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Realisasi 100%).

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Realisasi 100%).

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Realisasi 100%).

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Realisasi 100%).
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Realisasi 100%).

Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Realisasi 100%).

Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Realisasi 100%).
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Realisasi 100%).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Realisasi 100%).

Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Realisasi 100%).

Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Realisasi 100%).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Realisasi 100%).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Realisasi 100%).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Realisasi 100%).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Realisasi 100%).
- Fasilitasi Kunjungan Tamu (Realisasi 100%).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Realisasi 100%).

Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Realisasi 100%).

Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Realisasi 100%).

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Realisasi 100%).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Realisasi 100%).

Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Realisasi 92 %)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (Realisasi 100%)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Realisasi 100%).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Realisasi 100%).

3. Faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhi target kinerja program/kegiatan adalah disebabkan karena Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya dengan target 1 Unit Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan yang akan dipelihara tidak dapat direalisasikan karena sub kegiatan tersebut masuk dalam anggaran perubahan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja (Renja) dan pencapaian rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada table 2.1 (TC. 29) berikut :

TABEL 2.1 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS s/d TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Targte Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Ralisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Penunjang Pemerintahan Umum									
2	09	01								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	93,5 %	93,5 %	100 %	100 %	59 %
2	09	01	2	01						
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %

2	09	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %
2	09	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	4 Dok	80 %
2	09	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %
2	09	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	4 Dok	80 %
2	09	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	12 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	20 Lap	83 %
2	09	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %
2	09	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Org/ Bln	76 Org/ Bln	25 Org/ Bln	25 Org/ Bln	100 %	25 Org/ Bln	126 Org/ Bln	81 %
2	09	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	12 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	20 Dok	83 %

2	09	01	2	02	0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	24 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	48 Lap	80 %
2	09	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
2	09	01	2	03	0006	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	12 Lap	75 %
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	86 %	86 %	100 %	100 %	77 %
2	09	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	2 Paket	16 Paket	80 %
2	09	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket	20 Paket	7 Paket	7 Paket	100 %	6 Paket	33 Paket	75 %
2	09	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	12 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	3 Paket	17 Paket	85 %
2	09	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	14 Paket	11 Paket	11 Paket	100 %	11 Paket	36 Paket	75 %

2	09	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	16 Paket	80 %
2	09	01	2	06	0600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 %	0 Dok	0 Dok	0 %
2	09	01	2	06	0008	Fasilitasi Kungkungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	12 Lap	75 %
2	09	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	8 Lap	67 %
2	09	01	2	07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	09	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	15 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	6 Unit	24 Unit	100 %
2	09	01	2	08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	83 %
2	09	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	36 Lap	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Lap	60 Lap	83 %
2	09	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	36 Lap	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Lap	60 Lap	83 %

2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	38 %	38 %	100 %	100 %	80 %
2	09	01	2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	18 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	60 Unit	80 %
2	09	01	2	09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	4 Unit	80 %
2	09	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	15 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	27 Unit	82 %
2	09	01	2	09	0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 %	1 Unit	4 Unit	80 %
						Urusan Pangan									
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	67,5 %

2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM);	6 Dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	4 Dok	83 %
2	09	03	2	01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %
2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	66 %
2	09	03	2	02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %
2	09	03	2	02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	174 Ton	104 Ton	7.3 Ton	7.3 Ton	100 %	7.3 Ton	119 Ton	68 %
2	09	03	2	02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	174 Ton	104 Ton	7.3 Ton	7.3 Ton	100 %	7.3 Ton	119 Ton	68 %
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
2	09	04	2	01		Penyusunan Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	6 Dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	4 Dok	50 %
2	09	04	2	01	0001	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %

2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	72 Dokumen	24 Dok	12 Dok	12 Dok	100 %	12 Dok	48 Dok	50 %
2	09	04	2	02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan & Gizi Kabupaten/Kota	72 Laporan	36 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	60 Lap	83 %
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	75 %
2	09	02	2	01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jenis infrastruktur	6 Jenis	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 %	1 Jenis	6 Jenis	75 %
2	09	02	2	01	0003	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	18 Unit	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	- Unit	15 Unit	83 %
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	67 %
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah LDPM,LUPM dan LPM yang dikembangkan	36 Unit	12 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	24 Unit	83 %

2	09	03	2	01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	36 Unit	18 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	30 Unit	83 %
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan analisis harga dan Pasokan pangan	6 Dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	4 Dok	83 %
2	09	03	2	01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %
2	09	03	2			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	83 %
2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan	12 Dokumen	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	8 Dok	83 %
2	09	03	2	04	0001	Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %
2	09	03	2	04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan	3 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	5 Lap	83 %

2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	83 %
2	09	05	2	01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Pengawasan Keamananan Pangan Segar</i>	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	83 %
2	09	05	2	01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	5 Dok	83 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1.a. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	Ton	17,2 % (30 Ton)
		Persentase Desa Tahan Pangan	%	100
	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen Dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	HPP	≥HPP
		Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	CV ≤ 10% (3,73 %)
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi (1.200 Kkal)	%	100,2 % (2.104,7 Kkal)
		Tingkat Konsumsi Protein (59 Gr)	%	104 % (59,6 Gr)
		Persentase Keamanan Pangan	%	100
	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai AKIP	Predikat	B

B. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 2.1.b. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	17,2 % (30 Ton)	63,7 % (111 Ton)	370 % (Sangat berhasil)
		Persentase Desa Tahan Pangan	100 %	100 %	100 % Sangat berhasil
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen Dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	\geq HPP0	\geq HPP	100 % (Sangat berhasil)
		Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	$CV \leq 10\%$	$CV \leq 10\%$ (3,73 %)	100 % (Sangat berhasil)
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi (%)	100% (2.100 Kkal)	100,2% (2.104,7 Kkal)	100 % (Sangat Berhasil)
		Tingkat Konsumsi Protein (%)	100 % (57 Gr)	104% (59,6 Gr)	100 % (Sangat Berhasil)
		Persentase Keamanan Pangan (%)	100	100	100 % (Sangat berhasil)
4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai AKIP	B	B	100 % (Sangat berhasil)

Tabel 2.1.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan
				2023	2024	
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	%	45,7 % (79,5 Ton)	63,7 % (111 Ton)	18 %
		Persentase Desa Tahan Pangan	%	95	100 %	5 %
2	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP	≥HPP	0 %
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	≤10% (8,75%)	CV≤ 10% (3,73 %)	0 %
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi	%	102 % (2.143 Kkal)	100,2% (2.104,7 Kkal)	1,8 %
		Tingkat Konsumsi Protein	%	98,2% (56 Gr)	104% (59,6 Gr)	5,8 %
		Persentase Keamanan Pangan	%	100	100	0 %

4	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	Nilai	68,75 (B)	69 (B)	0 %
---	--	------------	-------	-----------	--------	-----

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sebagaimana terlihat pada table 2.1.b sehingga gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024:

- Indikator 1 yaitu Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras), realisasi capaian kinerja ditahun 2023 sebesar 45,7 % (79,5 Ton) sedangkan untuk tahun 2024 realisasi sebesar 63,7 % (111 Ton) sehingga mengalami kenaikan sebesar 18 %, sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Bapanas sebesar 95 Ton.
- Indikator 2 yaitu Persentase Desa Tahan Pangan, berdasarkan tabel 2.1.c di Tahun 2023 diperoleh realisasi capaian sebesar 95 % dari target 100% dan di Tahun 2024 diperoleh realisasi capaian sebesar 100 % dari target 100% sehingga dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5 % dan berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Tahun 2024 menunjukkan bahwa semua desa (88

desa) yang ada di Kabupaten Mamuju tidak ada yang masuk pada kategori desa rentan terhadap kerawanan pangan.

B. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran pertama dapat dicapai dengan program dan kegiatan seperti table berikut :

Tabel 2.1.d. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 1

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	100	100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>	Dokumen	1	1
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	1
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	17,2	64,9
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	17,2 % (30 Ton)	64,9 % (113 Ton)
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Persen	17,2 % (30 Ton)	64,9% (113 Ton)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100	100
<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</i>	Dokumen	1	1
Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	1	1
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam pencegahan rawan pangan akibat bencana alam maupun non alam yaitu penyediaan cadangan utama pemerintah dalam bentuk beras. Berdasarkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Beras Pemerintah, besaran ketersediaan cadangan pangan beras yang harus disiapkan pemerintah Kabupaten Mamuju ditahun 2024 sebesar 95 ton.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen**

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

- Indikator 1 Tingkat Harga gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), berdasarkan tabel 2.1.c realisasi capaian kinerja di Tahun 2023 sebesar 100 % sama dengan capaian kinerja di tahun 2024 (mencapai target 100%).
- Indikator 2 Persentase koefisien variasi (CV) harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen, berdasarkan table 2.1.c, di Tahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 100 % dengan koefisien Variasi 8,75 % sama dengan realisasi capaian di tahun 2024 yaitu 100% dengan koefisien Variasi 3,73 % ini menunjukkan bahwa Coefisien Variabel (CV) pangan pokok (beras) di Tahun 2023 dan Tahun 2024 masih berada di bawah standar (stabil) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 10 %.

- B. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kedua dapat dicapai dengan program dan kegiatan seperti table berikut :

Tabel 2.1.e. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 2

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	100	100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga dan Pasokan pangan</i>	Dokumen	1	1
Pemantauan Stok Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah LDPM, LUPM dan LPM yang dikembangkan</i>	Unit	6	6
Pengembangan Kelembagaan & Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	6	6

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen yaitu melalui survei atau pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok di 10 pasar yang ada di kecamatan yaitu Pasar Sentral dan Pasar Regional (Kecamatan

Mamuju), Pasar Dayanginna (Kec. Tapalang), Pasar Pasa'bu (Kec. Tapalang Barat), Pasar Bonehau (Kec. Bonehau), Pasar Kalumpang (Kec. Kapumpang), Pasar Tasiu (Kec. Kalukku), Pasar Toansang (Kec. Papalang), Pasar tarailu (Kec. Sampaga dan Pasar Campaloga (Kec. Tommo) yang dilakukan satu kali dalam seminggu yang kemudian dilaporkan ke provinsi dan pusat. Adapun kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju yang membantu pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi yaitu pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan setiap hari kerja di Kantor Dinas Ketahananann Pangan kabupaten Mamuju dan di beberapa lokasi sehubungan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan hari – hari besar lainnya.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024:

- Indikator 1 Tingkat Konsumsi Energi, berdasarkan tabel 2.1.c Tahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 102 % (2.143 Kkal) dan untuk Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100,2 % (2.104,7 Kkal) mengalami penurunan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 1,8 %. Namun masih melampaui target yang ditetapkan yaitu 100 % (2.100 Kkal) yang menunjukkan bahwa Tingkat konsumsi energi di Kabupaten Mamuju sudah melampaui target yang ditetapkan.

- Indikator 2 Tingkat Konsumsi Protein, berdasarkan tabel 2.1.c Tahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 98,2 % (56 Gr) dan untuk Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 104 % (59,6 Gr) mengalami peningkatan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 5,8 % dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 100 % (57 Gr).
- Indikator (3) Persentase keamanan pangan, berdasarkan tabel 2.1.c Tahun 2023 dan tahun 2024 realisasi capaian kinerja sama yaitu sebesar 100 % tidak mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun capaian sudah mencapai target 100 %.

B. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran ketiga dicapai dengan program dan kegiatan seperti table berikut :

Tabel 2.1.f Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 3

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100	100
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan</i>	Dokumen	1	1
Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	100	100
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Pengawasan Keamananan Pangan Segar</i>	Persen	100	100
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil analisis sudah melampaui target karena Pada indikator Tingkat konsumsi energi dan protein telah tercapai pada Tahun 2024 Jumlah Konsumsi Energi 2.104,7 Kkal/Kap/hari dan jika dipersentasekan terhadap nilai standar diperoleh hasil 100,2%, sedangkan untuk jumlah konsumsi protein pada tahun 2024 sebesar 59,6 gram/Kapita/hari dan jika dipersentasekan terhadap nilai standar diperoleh hasil 104,6%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi energi dan protein yang dikonsumsi sudah melebihi standar (100%). hal ini berarti dari segi kuantitas konsumsi pangan di kabupaten mamuju baik dari jumlah energi dan protein sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Target skor PPH Konsumsi Tahun 2024 berdasarkan RPJMN sebesar 85,

terlihat telah melampaui target, tetapi masih belum mencapai skor ideal yaitu 100 hal ini menunjukkan bahwa dari segi kualitas konsumsi belum memenuhi standar yang berarti bahwa tingkat keberagaman konsumsi pangan di kabupaten mamuju belum optimal, hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok pangan yang berlebihan dikonsumsi oleh masyarakat yakni beras, minyak dan lemak dan ada juga kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi oleh masyarakat yakni Umbi-umbian, Pangan hewani, sayuran dan buah, sedangkan yang telah seimbang yakni kelompok pangan gula dan buah biji berminyak Tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya beberapa Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan di kabupaten mamuju diantaranya program Desa B2SA, Pemberian bahan pangan bagi anak stunting, Genius, B2SA Go To School yang memberikan sosialisasi pemahaman kepada Masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi Seimbang dan aman (B2SA) sehingga sedikit demi sedikit dapat mengubah pola pikir Masyarakat tentang konsumsi pangan yang benar tetapi program ini harus terus digalakkan agar semua Masyarakat dapat memahami pola konsumsi pangan yang B2SA

3. Sasaran 4 : **Terlaksananya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

A. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 :

Tahun 2023 hasil evaluasi AKIP diperoleh bobot 68,75 dengan kategori **Baik** kemudian ditahun 2024 mengalami kenaikan bobot menjadi 69 dengan kategori **Baik** sehingga terjadi peningkatan bobot dalam kategori yang sama sebesar 0,2 poin.

- B. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Untuk sasaran 4 yaitu Terlaksananya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.g. Program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran 4

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Persen	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat Daerah	Persen	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	24	24
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100
Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	Persen	100	100
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2

<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	Persen	100	100
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Persen	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Laporan	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	Persen	100	100
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar pajaknya	Unit	21	21
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	Unit	1	1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Unit	6	6
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhailitasi	Unit	1	1

C. Analisis Faktor Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam memunjang terlaksananya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima yang diukur dengan indikator nilai AKIP yaitu

dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan tepat waktu.

**TABEL 2.2 (T-C.30.)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU**

NO	INDIKATOR (TUJUAN & SASARAN STRATEGIS)	SPM/ Standar Nasional	IKK	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Skor PPH Ketersediaan (%)			%	93	94	95	96	93,54	95,25	95,28		
2	Skor PPH Konsumsi (%)			%	84	85	86	87	80,2	82,3	88,62		
3	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)			%	8,6 % (15 Ton)	11,5 % (20 Ton)	17,2% (30 Ton)	23% (40 Ton)	14,7% (25,797 Ton)	49,9% (86,7 Ton)	63,7 % (111 Ton)		
4	Persentase Desa Tahan Pangan			%	100	100	100	100	91	95	100		
5	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)			≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP	≥HPP		
6	Koefisien variasi harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen			CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%	CV≤10%		
7	Tingkat konsumsi energi			%	100	100	100	100	80.2	102	100,2		
8	Tingkat konsumsi energi			%	100	100	100	100	80	98,2	104		
9	Persentase keamanan pangan			%	100	100	100	100	100	100	100		

10	Persentase Ketersediaan pangan sesuai kebutuhan masyarakat			%	100	100	100	100	100	100	100		
11	Nilai Akip			Predikat	B	B	B	B	B	B	B		
12			Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	LPM	6	6	6	6	6	6	6		
13			Tersedia & tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Komoditi	12	12	12	12	12	19	19		
14			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Kelompok	5	5	5	5	5	37	5		
15			Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1		
16			Tertanganinya kerawanan pangan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		
17			Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Persen	20%	20%	20%	20%	8,2	0,3 %	3,9 %		
18			Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Persen	100	100	100	100	100	100	100		

Berdasarkan Tabel 2.2 (TC. 30) dapat dilihat bahwa semua indikator mencapai target hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di kabupaten mamuju sudah beragam dan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dari segi kuantitas konsumsi pangan di kabupaten mamuju baik dari jumlah energi dan protein sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Hal yang perlu dilakukan agar kualitas konsumsi penduduk Kabupaten Mamuju mencapai ideal kedepan yaitu :

1. Perlu Meningkatkan konsumsi bahan pangan sumber protein terutama protein hewani yakni konsumsi ikan dan daging,
2. Perlu Meningkatkan konsumsi umbi-umbian, salah satunya dengan Upaya meningkatkan inovasi dari UMKM dalam pengolahan bahan pangan local terutama yang bersumber dari umbi-umbian
3. Perlu Meningkatkan konsumsi sayur dan buah melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye makan buah dan sayur
4. Perlu mengurangi konsumsi beras dan terigu dengan mengganti dengan konsumsi umbi-umbian, melalui kegiatan, sosialisasi, kampanye pangan **"Kenyang tidak Harus Nasi"**
5. Perlu Melakukan perubahan pola makan sedikit demi sedikit misalnya konsumsi pada setiap rapat/pertemuan terbuat dari buah atau umbi-umbian
6. Dibutuhkan adanya sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut tentang pangan bergizi, berimbang, sehat dan aman kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju sehingga pemenuhan gizi atau konsumsi pangan tidak hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan karbohidrat akan tetapi juga pemenuhan pangan yang berasal dari sayuran, buah-buahan, ikan dan sumber protein hewani lainnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstara Dinas Ketahanan Pangan, maka dapat dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Mamuju.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Isu-isu penting dimaksud mencakup :

1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya Pegawai Negeri Sipil teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
2. Data produksi pangan masih merupakan data agregat kecamatan dan belum rinci data desa sehingga kualitas dan validitas hasil analisis/pelaporan FSVA dan SKPG belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Data ekspor dan impor pangan masih terbatas pada data pangan tertentu, dan belum merupakan data pangan secara menyeluruh per kecamatan, sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
4. Masih Rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan sebagai akibat belum optimalnya distribusi, akses dan cadangan pangan
5. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata
6. Harga bahan pangan masih fluktuatif
7. Masih terdapat daerah rawan pangan

8. Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius
9. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD dan APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju serta proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD 2025 – 2029 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan nasional dan provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Mamuju Tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD dan perlu dilakukan rewiw terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rewiw terhadap rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026 dilihat pada Tabel 2.3 (TC. 31) berikut :

TABEL 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN MAMUJU

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DINAS KETAHANAN PANGAN					3,608,900,807					3,366,939,659	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Mamuju	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,091,425,807	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mamuju	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,984,995,859		
2 09 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>24,600,000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>25,698,110</i>		

2	09	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,277,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,992,910
2	09	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,013,400
2	09	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,616,000
2	09	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,974,600
2	09	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,149,200

2 09 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,229,000	
2 09 01 2 01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Uru yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	723,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Uru yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	723,000	
2 09 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat	100	2,801,400,807	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat	100	2,796,707,159	
2 09 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	2,709,400,807	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/Bln	2,692,439,659	
2 09 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	71,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	87,800,000	

2	09	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16,467,500	
2	09	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	5,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	5,424,000	
2	09	01	2	03	0006	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5,800,000	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5,424,000	
2	09	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	3,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1,931,000	
2	09	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,931,000	

2 09 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	100	84,300,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	100	62,294,940
2 09 01 2 06 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,800,000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,557,600
2 09 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1,700,000	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1,585,600
2 09 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1,079,800
2 09 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	8,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	5,020,440
2 09 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4,108,000
2 09 01 2 06 0008	Fasilitasi Kungkungan Tamu	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,800,000	Fasilitasi Kungkungan Tamu	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,166,000

2 09 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	65,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	47,777,500	
2 09 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	50,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	3,000,000	
2 09 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3,000,000	
2 09 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	64,156,840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	58,324,400	
2 09 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56,236,840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51,124,400	
2 09 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,920,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,200,000	

2 09 01 2 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100	61,168,160	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100	31,616,250
2 09 01 2 09 0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	35,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	14,426,250
2 09 01 2 09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7,150,000
2 09 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5,040,000
2 09 01 2 09 0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,168,160	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000

2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Energi	100	386,475,000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Mamuju	Persentase Ketersediaan Energi	100	266,614,900
2	09	03	2	01		<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Kab. Mamuju	<i>Rata-Rata Persentase ketersediaan pangan pokok strategis Terhadap Kebutuhan</i>	2	253,200,000	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Kab. Mamuju	<i>Rata-Rata Persentase ketersediaan pangan pokok strategis Terhadap Kebutuhan</i>	2	145,303,600
2	09	03	2	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	20,200,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	15,510,400
2	09	03	2	01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	183,000,000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	100,033,600
2	09	03	2	01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Mamuju	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	27,500,000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Mamuju	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	14,999,800

2	09	03	2	01	0020	Proyeksi Penyusunan Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota	Kab. Mamuju	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22,500,000	Proyeksi Penyusunan Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota	Kab. Mamuju	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14,759,800	
2 09 03 2 02						<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	100	133,275,000	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	100	121,311,300	
2	09	03	2	02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Mamuju	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	20,500,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Mamuju	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	17,310,800	
2	09	03	2	02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7,3 Ton	112,775,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7,3 Ton	104,000,500	Mendukung Inflasi
2 09 04						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Mamuju	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan	95	46,700,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Mamuju	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan	95	49,000,700	
2 09 04 2 01						<i>Penyusunan Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase Desa Rentan Rawan Pangan</i>	4,54	24,100,000	<i>Penyusunan Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase Desa Rentan Rawan Pangan</i>	4,54	20,000,700	

2 09 04 2 01 0001	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Mamuju	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	24,100,000	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Mamuju	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	20,000,700	
2 09 04 2 02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Mamuju	Persentase Kecamatan Tahan Pangan	55	22,600,000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Mamuju	Persentase Kecamatan Tahan Pangan	55	29,000,000	-
2 09 04 2 02 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan & Gizi Kabupaten/Kota	12 Laporan	22,600,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	29,000,000	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Mamuju	Persentase Nilai Tukar Petani	100	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Mamuju	Persentase Nilai Tukar Petani	100	-	
2 09 02 2 01	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Mamuju	Jenis infrastruktur	1 Jenis	0	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Mamuju	Jenis infrastruktur	1 Jenis	0	

2 09 02 2 01 0003	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian panganlainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian panganlainnya	Kab. Mamuju	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	0	
2 09 03 2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Mamuju	Persentase Konsumsi Energi	100	59,000,000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Mamuju	Persentase Konsumsi Energi	100	46,899,500	
2 09 03 2 04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai denagn Angka Kecukupan Gizi</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase Energi Kelompok Pangan Konsumsi</i>	100	59,000,000	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai denagn Angka Kecukupan Gizi</i>	Kab. Mamuju	<i>Persentase Energi Kelompok Pangan Konsumsi</i>	100	46,899,500	
2 09 03 2 04 0001	Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Mamuju	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	25,000,000	Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Mamuju	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	25,899,500	
2 09 03 2 04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Mamuju	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	34,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Mamuju	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	21,000,000	Mendukung Inflasi

2 09 05						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Mamuju	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	62	25,300,000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Mamuju	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	62	19,428,700
2 09 05 2 01						<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	Kab. Mamuju	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	100	25,300,000	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	Kab. Mamuju	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	100	19,428,700
2	09	05	2	01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Mamuju	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	25,300,000	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Mamuju	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	19,428,700

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik merupakan panduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD. Usulan masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka OPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan kedalam program dan kegiatan OPD Tahun 2026, namun untuk tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju tidak memiliki usulan hasil Musrenbang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mamuju. (*Tabel 2.4 :TC. 32*)

**Tabel 2.4 (T-C.32.)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026
KABUPATEN MAMUJU**

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		TIDAK ADA			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2025 - 2045, sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025 - 2029 adalah penurunan Tingkat kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Visi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Yang kemudian dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut: :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperas;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan rincian dari Delapan Agenda Prioritas tersebut, maka Ketahanan Pangan tercakup dalam Agenda Prioritas yang kedua yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Mamuju, pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menunjang Misi Kedua yaitu **Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal** yang sejalan dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan sasaran strategis Meningkatnya

Keterediaan Pangan, Meningkatnya Keterjangkauan Pangan dan Meningkatnya Pemanfaatan Pangan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu faktual yang berkembang kearah perubahan dan analisis strategis. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,97	84,47	85,97	87,47	88,97	90,47	
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor PPH Ketersediaan	95.30	95.35	95.40	95.45	95.50	95,55	
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Persentase stabilitas harga pangan pokok strategis	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Konsumsi	87	88	88.5	89	89.5	90	
		Terselenggara Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP	B (69)	B (69,3)	B (69,6)	B (69,9)	BB (70,5)	BB (71)	

Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** (Tabel 3.2) dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan sesuai RENSTRA 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya ketejangkauan pangan;
3. Meningkatnya pemanfaatan pangan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tantangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah :

1. Minimnya ketersediaan SDM yang kompeten pada urusan pangan
2. Ketergantungan masyarakat akan komoditas beras sebagai bahan pangan pokok masih tinggi.
3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang panganekaragaman pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
4. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung Cadangan pangan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi

Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah:

1. Dukungan dari pemerintah melalui APBN maupun APBD Kabupaten Mamuju.
2. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.

5.3. Program dan kegiatan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026, mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Sebagaimana rangkaian proses penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan Penyusunan program/kegiatan dalam Renja Tahun 2026.

Pada Renja Tahun 2026 terdapat 1 program rutin dan 3 program teknis dengan jumlah kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERIFIKASI PANGAN

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

III. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

**TABEL 3.1 (T-C.33.)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS KETAHANAN PANGAN				3,366,939,659				3,451,113,150
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	2,984,995,859	APBD		100%	3,059,620,755
2	09	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>25,698,110</i>	<i>APBD</i>		<i>100</i>	<i>26,340,563</i>
2	09	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Mamuju	2 Dokumen	<i>1,992,910</i>	APBD		2 Dokumen	2,042,733
2	09	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	6,013,400	APBD		1 Dokumen	6,163,735

2	09	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	4,616,000	APBD	1 Dokumen	4,731,400
2	09	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	3,974,600	APBD	1 Dokumen	4,073,965
2	09	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	3,149,200	APBD	1 Dokumen	3,227,930
2	09	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	4 Laporan	5,229,000	APBD	4 Laporan	5,359,725
2	09	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Uru yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	1 Berita Acara	723,000	APBD	1 Berita Acara	741,075
2	09	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>2,796,707,159</i>	<i>APBD</i>	<i>100</i>	<i>2,866,624,838</i>
2	09	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju	30 orang / Bln	2,692,439,659	APBD	30 orang / Bln	2,759,750,650
2	09	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	4 Dokumen	87,800,000	APBD	4 Dokumen	89,995,000

2	09	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	12 Laporan	16,467,500	APBD		12 Laporan	16,879,188
2	09	01	2	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Kab. Mamuju</i>	100	<i>5,424,000</i>	<i>APBD</i>		100	5,559,600
2	09	01	2	03	0006	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	4 Laporan	5,424,000	APBD		4 Laporan	5,559,600
2	09	01	2	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>1,931,000</i>	<i>APBD</i>		<i>100</i>	<i>1,979,275</i>
2	09	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Kab. Mamuju</i>	1 Dokumen	1,931,000	APBD			1,979,275
2	09	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>62,294,940</i>	<i>APBD</i>		<i>100</i>	<i>63,852,314</i>
2	09	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Mamuju</i>	2 Paket	1,557,600	APBD		2 Paket	1,596,540
2	09	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Mamuju</i>	6 Paket	1,585,600	APBD		6 Paket	1,625,240
2	09	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	<i>Kab. Mamuju</i>	3 Paket	1,079,800	APBD		3 Paket	1,106,795
2	09	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>Kab. Mamuju</i>	11 Paket	5,020,440	APBD		11 Paket	5,145,951

2	09	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju	4 Paket	4,108,000	APBD		4 Paket	4,210,700
2	09	01	2	06	0008	Fasilitasi Kungkungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju	4 Laporan	1,166,000	APBD		4 Laporan	1,195,150
2	09	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	2 Laporan	47,777,500	APBD		2 Laporan	48,971,938
2	09	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Mamuju	100	3,000,000	APBD		100	3,075,000
2	09	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju	1 Unit	3,000,000	APBD		6 Unit	3,075,000
2	09	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Kab. Mamuju	100	58,324,400	APBD		100	59,782,510
2	09	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	51,124,400	APBD		12 Lap	52,402,510
2	09	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	7,200,000	APBD		12 Lap	7,380,000
2	09	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	Kab. Mamuju	100	31,616,250	APBD		100	32,406,656

2	09	01	2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju	21 Unit	14,426,250	APBD	21 Unit	14,786,906
2	09	01	2	09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju	1 Unit	7,150,000	APBD	1 Unit	7,328,750
2	09	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju	6 Unit	5,040,000	APBD	6 Unit	5,166,000
2	09	01	2	09	0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mamuju	1 Unit	5,000,000	APBD	1 Unit	5,125,000
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi	Kab. Mamuju	100	266,614,900	APBD	100	273,280,273
2	09	03	2	01		<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Rata-Rata Persentase ketersediaan pangan pokok strategis Terhadap Kebutuhan</i>	Kab. Mamuju	100	145,303,600	APBD	100	148,936,190
2	09	03	2	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Mamuju	1 Laporan	15,510,400	APBD	1 Laporan	15,898,160
2	09	03	2	01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	1 Laporan	100,033,600	APBD	1 Laporan	102,534,440

2	09	03	2	01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Mamuju	1 Dokumen	14,999,800	APBD		1 Dokumen	15,374,795
2	09	03	2	01	0020	Proyeksi Penyusunan Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	1 Dokumen	14,759,800	APBD		1 Dokumen	15,128,795
2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	100	121,311,300	APBD	100	100.00%	124,344,083
2	09	03	2	02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Mamuju	1 Dokumen	17,310,800	APBD		1 Dokumen	17,743,570
2	09	03	2	02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	7,3 Ton	104,000,500	APBD	Mendukung Inflasi	7,3 Ton	106,600,513
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan	Kab. Mamuju	95	49,000,700	APBD		95	50,225,718
2	09	04	2	01		Penyusunan Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Kab. Mamuju	0	20,000,700	APBD		0	20,500,718
2	09	04	2	01	0001	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Mamuju	1 Dokumen	20,000,700	APBD		1 Dokumen	20,500,718
2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota	Persentase Kecamatan Tahan Pangan	Kab. Mamuju	55	29,000,000	APBD		55	29,725,000

2	09	04	2	02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	12 Laporan	29,000,000	APBD		12 Laporan	29,725,000
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Nilai Tukar Petani	Kab. Mamuju	100	-	APBD / DAK		100	-
2	09	02	2	01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jenis infrastruktur	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>Jenis</i>	0	<i>APBD / DAK</i>		<i>Jenis</i>	-
2	09	02	2	01	0003	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Mamuju	0 Unit				Unit	-
2	09	03	2			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi Energi	Kab. Mamuju	100	46,899,500	APBD		100	48,071,988
2	09	03	2	04		<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Persentase Energi Kelompok Pangan Konsumsi</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>46,899,500</i>	<i>APBD</i>	-	<i>1 Dokumen</i>	<i>48,071,988</i>
2	09	03	2	04	0001	Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Mamuju	1 Dokumen	25,899,500	APBD		1 Dokumen	26,546,988
2	09	03	2	04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Mamuju	1 Laporan	21,000,000	APBD / APBN	Mendukung Inflasi	1 Laporan	21,525,000

2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Kab. Mamuju	62	19,428,700	APBD		62	19,914,418
2	09	05	2	01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>19,428,700</i>	<i>APBD</i>		<i>100</i>	<i>19,914,418</i>
2	09	05	2	01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Mamuju	1 Laporan	19,428,700	APBD		1 Laporan	19,914,418

BAB IV
RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Rencana Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026 berisi Program Pembangunan Daerah (program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju . Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sebanyak 4 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Total Kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.366.939.659,- dimana anggaran tersebut di alokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bidang pangan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2026 seperti pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KETAHANAN PANGAN				3,366,939,659	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju	100%	2,984,995,859	APBD
2 09 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>25,698,110</i>	<i>APBD</i>
2 09 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Mamuju	2 Dokumen	<i>1,992,910</i>	APBD
2 09 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Mamuju	1 Dokumen	<i>6,013,400</i>	APBD

2	09	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	4,616,000	APBD
2	09	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	3,974,600	APBD
2	09	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Mamuju	1 Dokumen	3,149,200	APBD
2	09	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	4 Laporan	5,229,000	
2	09	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mamuju	1 Berita Acara	723,000	
2	09	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>2,796,707,159</i>	<i>APBD</i>
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mamuju	30 Orang / Bln	2,692,439,659	APBD
2	09	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mamuju	4 Dokumen	87,800,000	APBD
2	09	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Mamuju	12 Laporan	16,467,500	APBD
2	09	01	2	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>5,424,000</i>	<i>APBD</i>
2	09	01	2	03	06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mamuju	4 Laporan	5,424,000	APBD
2	09	01	2	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>1,931,000</i>	<i>APBD</i>
2	09	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Mamuju	1 Dokumen	1,931,000	APBD

2	09	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi umum perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	100	62,294,940	APBD
2	09	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	2 Paket	1,557,600	APBD
2	09	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	6 Paket	1,585,600	APBD
2	09	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mamuju	3 Paket	1,079,800	APBD
2	09	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	11 Paket	5,020,440	APBD
2	09	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mamuju	4 Paket	4,108,000	APBD
2	09	01	2	06	08	Fasilitasi Kungkungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mamuju	4 Laporan	1,166,000	APBD
2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mamuju	2 Laporan	47,777,500	APBD
2	09	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	100	3,000,000	APBD
2	09	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mamuju	1 Unit	3,000,000	APBD
2	09	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	100	58,324,400	APBD
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	51,124,400	APBD
2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mamuju	12 Laporan	7,200,000	APBD
2	09	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	100	31,616,250	APBD
2	09	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Mamuju	21 Unit	14,426,250	APBD
2	09	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mamuju	1 Unit	7,150,000	APBD

2	09	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mamuju	6 Unit	5,040,000	APBD
2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Mamuju	1 Unit	5,000,000	APBD
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi	Kab. Mamuju	100	266,614,900	APBD
2	09	03	2	01		<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Rata-Rata Persentase ketersediaan pangan pokok strategis Terhadap Kebutuhan</i>	Kab. Mamuju	100	145,303,600	APBD
2	09	03	2	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Mamuju	1 Laporan	15,510,400	APBD
2	09	03	2	01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota	Kab. Mamuju	1 Laporan	100,033,600	
2	09	03	2	01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Mamuju	1 Dokumen	14,999,800	
2	09	03	2	01	0020	Proyeksi Penyusunan Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	1 Dokumen	14,759,800	
2	09	03	2	02		<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>121,311,300</i>	<i>APBD</i>
2	09	03	2	02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Mamuju	1 Dokumen	17,310,800	APBD
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	7,3 Ton	104,000,500	APBD
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Capaian Analisis Rentan dan Rawan Pangan	Kab. Mamuju	95	49,000,700	APBD
2	09	04	2	01		<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Persentase Desa Rentan Rawan Pangan</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>0</i>	<i>20,000,700</i>	<i>APBD</i>
2	09	04	2	01	01	Penyusunan Pemuktahiran & analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Mamuju	1 Dokumen	20,000,700	APBD
2	09	04	2	02		<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten Kota</i>	<i>Persentase Kecamatan Tahan Pangan</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>55</i>	<i>29,000,000</i>	<i>APBD</i>
2	09	04	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Mamuju	12 Laporan	29,000,000	APBD

2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi Energi	Kab. Mamuju	100	46,899,500	APBD
2	09	03	2	04		<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Persentase Energi Kelompok Pangan Konsumsi</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>46,899,500</i>	<i>APBD</i>
2	09	03	2	04	01	Penyusunan & Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Mamuju	1 Dokumen	25,899,500	APBD
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Mamuju	1 Laporan	21,000,000	APBD
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Kab. Mamuju	62	19,428,700	APBD
2	09	05	2	01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman</i>	<i>Kab. Mamuju</i>	<i>100</i>	<i>19,428,700</i>	<i>APBD</i>
2	09	05	2	01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Mamuju	1 Laporan	19,428,700	APBD

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan di dalam pelaksanaannya akan senantiasa dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan bersama unsur pimpinan Dinas Ketahanan Pangan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Anggaran dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Pencapaian kinerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana

peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten serta dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Merupakan Dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 dan menjadi acuan serta pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 03 September 2025

Kepala Dinas



H. LUKMAN SANUSI, SP, SE, MM
NIP. 19651104 198903 1 012